

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan adalah suatu proses yang mencakup berbagai dimensi dan diiringi oleh perubahan struktural guna meningkatkan kualitas hidup serta kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan dalam pembangunan dapat diperoleh dengan indikator seperti pertumbuhan ekonomi, perubahan struktur ekonomi, dan pengurangan kesenjangan pendapatan antar individu, wilayah, dan sektor. Pencapaian pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta distribusi pendapatan yang lebih merata menjadi kunci utama dalam mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan. Namun, meskipun terjadi pertumbuhan ekonomi yang pesat, ketimpangan pendapatan antar wilayah masih tetap ada (Hadju *et al.*, 2021).

Kesenjangan ekonomi atau disparitas pendapatan merupakan masalah yang nyata dihadapi oleh masyarakat, baik di negara maju maupun negara berkembang, dan menjadi isu yang perlu segera ditangani. Kesenjangan ekonomi, khususnya dalam hal distribusi pendapatan, masih menjadi tantangan besar di negara berkembang, termasuk Indonesia. Perbedaan pendapatan ini pada akhirnya menimbulkan ketimpangan dalam distribusi pendapatan. Ketimpangan pendapatan merujuk pada konsep yang membahas cara pendapatan didistribusikan di antara individu atau rumah tangga dalam suatu Masyarakat (Sukirno, 2006).

Ketimpangan secara keseluruhan tidak bisa dihapuskan, namun hanya bisa diminimalkan hingga tingkat yang dianggap wajar dalam konteks sosial tertentu untuk memastikan kesejahteraan sistem seiring dengan perkembangannya. Dengan demikian, ketimpangan adalah masalah yang

bersifat universal, yang terjadi di semua jenis negara, baik negara miskin, berkembang, serta maju. Perbedaannya terletak pada sejauh mana ketimpangan tersebut terjadi di setiap wilayah. Hal ini membutuhkan langkah-langkah khusus dari pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, melalui berbagai upaya untuk memperbaiki distribusi pendapatan di berbagai sektor.

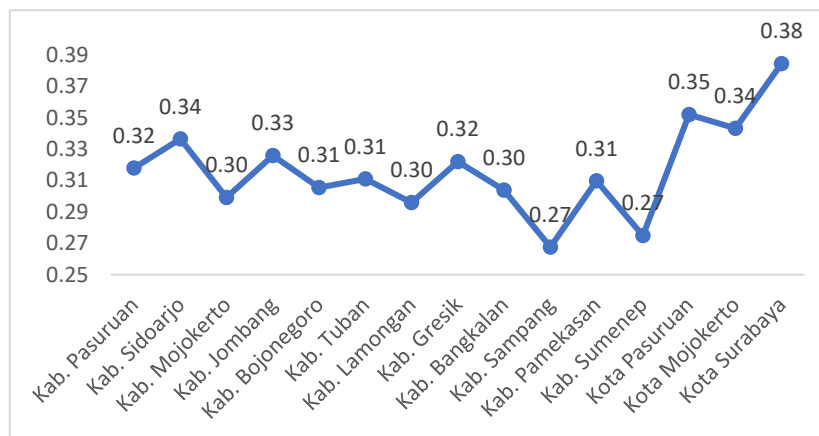
Ketimpangan mempunyai dua dampak, yaitu dampak positif dan negative (Todaro, 2004). Dampak positif dari ketimpangan yaitu dapat mendorong daerah yang belum berkembang agar lebih berkompetisi dalam usaha meningkatkan kesejahteraannya. Namun, di sisi lain, ketimpangan juga membawa dampak negatif, seperti menciptakan inefisiensi ekonomi, mengurangi solidaritas dan stabilitas sosial, serta secara umum dipandang sebagai ketidakadilan yang merugikan kesejahteraan masyarakat.

Ketimpangan pendapatan terjadi akibat adanya perbedaan dalam komposisi penduduk, sumber daya, serta karakteristik yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Ketimpangan ini mencerminkan adanya jurang perbedaan pendapatan antara masyarakat di daerah yang lebih maju dan yang tertinggal. Seiring dengan meningkatnya ketimpangan pendapatan, distribusi pendapatan dalam masyarakat pun menjadi semakin tidak merata. Kondisi seperti itu menyebabkan kesenjangan pendapatan bahkan dalam ekonomi yang relatif kuat, yang memengaruhi mereka yang berpendapatan rendah (Michael, 2011).

Gerbangkertasusila, yang kini dikenal sebagai Germakertasusila Plus, merupakan wilayah pengembangan menurut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2011-2031. Wilayah ini dikelompokkan menjadi delapan Wilayah

Pengembangan (WP), salah satunya adalah Wilayah Pengembangan (WP) Germakertasusila Plus. Dalam BAB IV Pasal 19 Ayat 3 Poin (a), Wilayah Pengembangan (WP) Germakertasusila Plus yang berpusat di Kota Surabaya, mencakup daerah berikut: Kota Surabaya, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Tuban, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Gresik, Kabupaten Mojokerto, Kota Mojokerto, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan, Kabupaten Jombang, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, dan Kabupaten Sumenep. Wilayah ini memiliki beragam fungsi, termasuk industri, transportasi, pariwisata, jasa, serta perdagangan, pertanian, perkebunan, hortikultura, kehutanan, perikanan, peternakan, pendidikan, kesehatan serta pertambangan.

Germakertasusila Plus merupakan salah satu daerah pengembangan di Jawa Timur mencakup 15 kabupaten/kota. Wilayah ini memiliki peran strategis dan mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang cukup dinamis. Meskipun daerah Germakertasusila Plus mempunyai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, ketimpangan pendapatan antar penduduk di wilayah ini masih menjadi perhatian utama. Peneliti memilih kawasan objek penelitian yaitu “Germakertasusila Plus” yang terdiri dari 15 Kabupaten/Kota. Germakertasusila Plus juga dikenal sebagai kawasan metropolitan terbesar kedua di Indonesia, dengan Surabaya sebagai pusat utamanya. Kota ini menjadi pusat utama dari berbagai aktivitas ekonomi di Jawa Timur, serupa dengan Jabodetabek yang berpusat di Jakarta. Para peneliti berharap wilayah pengembangan Germakertasusila Plus dapat mencerminkan karakteristik Provinsi Jawa Timur secara keseluruhan serta berperan sebagai dasar yang penting dalam perumusan kebijakan pembangunan.



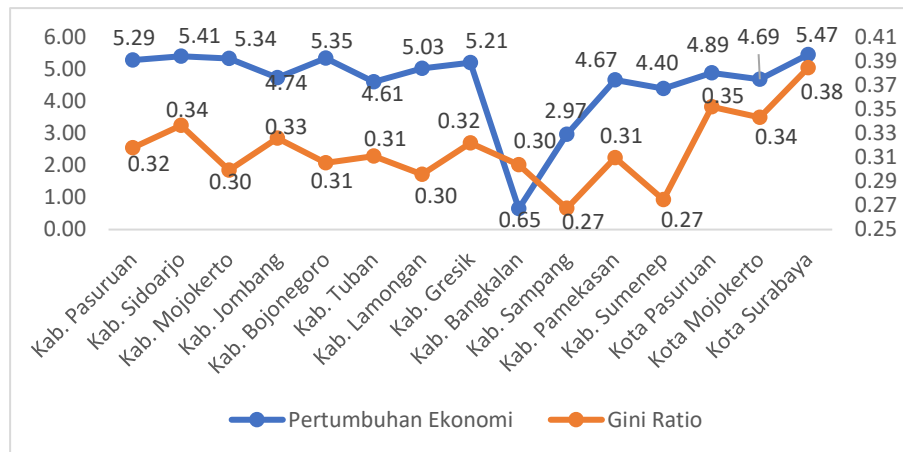
Gambar 1. 1 Grafik Rata-rata Gini Rasio Germakertasusila Plus tahun 2011-2023

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah (2023)

Berdasarkan Gambar 1.1 menunjukkan nilai rata-rata rasio gini di berbagai kabupaten/kota di Germakertasusila Plus. Rasio Gini adalah indikator yang menggambarkan tingkat ketimpangan distribusi pendapatan; semakin tinggi nilainya (maksimal 1), semakin timpang distribusi pendapatan di wilayah tersebut. Berdasarkan grafik, Kota Surabaya memiliki rata-rata rasio Gini tertinggi sebesar 0,38, disusul oleh Kota Pasuruan (0,35) dan Kota Mojokerto (0,34), yang menandakan bahwa wilayah perkotaan cenderung memiliki ketimpangan pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan wilayah kabupaten. Sebaliknya, Kabupaten Sampang mencatatkan rata-rata rasio gini terendah sebesar 0,27, menunjukkan distribusi pendapatan yang relatif lebih merata, meskipun hal ini juga dapat mencerminkan homogenitas pendapatan yang cenderung rendah. Pola umum dalam grafik ini menunjukkan bahwa daerah dengan urbanisasi tinggi cenderung menghadapi tantangan lebih besar dalam pemerataan ekonomi, sementara daerah dengan tingkat pembangunan lebih rendah menunjukkan ketimpangan yang lebih kecil namun juga berpotensi disertai dengan tingkat kesejahteraan yang lebih rendah secara umum.

Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan merupakan dasar utama untuk mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Tingkat pertumbuhan ekonomi yang tergambar dalam kenaikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di suatu daerah dapat menggambarkan sejauh mana keberhasilan dalam proses pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi ini mencerminkan tingkat peningkatan total pendapatan dari sembilan sektor ekonomi, yang kemudian menjelaskan sejauh mana kemajuan pembangunan ekonomi di suatu daerah. Indikator pertumbuhan ekonomi sangat penting untuk menilai dan mengukur sejauh mana proses pembangunan yang telah dilakukan berhasil, dengan mengacu pada tujuan pembangunan yang hendak dicapai, serta untuk mengevaluasi dan merencanakan arah pembangunan ekonomi di masa depan.

Tujuan utama dalam pelaksanaan pembangunan yakni pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan pemerataan hasil pembangunan. Dalam banyak kasus, pertumbuhan ekonomi cenderung terkonsentrasi di sektor atau kelompok tertentu, sehingga menciptakan jurang yang semakin lebar antara kelompok berpenghasilan tinggi dan rendah. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana pertumbuhan ekonomi benar-benar memberikan dampak yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Namun, dalam prakteknya, meskipun pertumbuhan ekonomi yang tinggi terjadi, hal tersebut justru menimbulkan ketimpangan pendapatan di setiap daerah (Hadju *et al.*, 2021).



Gambar 1. 2 Grafik Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi dan Gini Rasio Wilayah Pengembangan (WP) Germakertasusila Plus Tahun 2011-2023

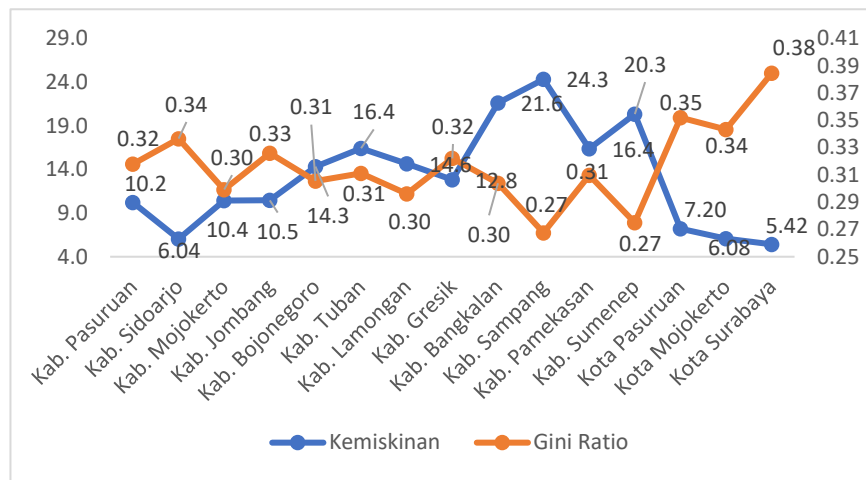
Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah (2023)

Berdasarkan Gambar 1.2 menggambarkan hubungan antara rata-rata pertumbuhan ekonomi dan rasio gini di berbagai kabupaten/kota di Germakertasusila Plus. Terlihat bahwa rata-rata pertumbuhan ekonomi di sebagian besar wilayah berada pada kisaran 4–5 persen, dengan nilai tertinggi dicapai oleh Kota Surabaya (5,47%) dan terendah oleh Kabupaten Bangkalan (0,65%). Meskipun demikian, tidak tampak korelasi yang jelas antara rata-rata pertumbuhan ekonomi dan rasio Gini. Misalnya, Kabupaten Sidoarjo mencatat rata-rata pertumbuhan ekonomi tinggi (5,41%) namun memiliki rata-rata rasio gini relatif rendah (0,30), sedangkan Kota Surabaya yang rata-rata pertumbuhan ekonominya juga tinggi (5,47%) memiliki rata-rata rasio Gini paling tinggi (0,38), menunjukkan ketimpangan pendapatan yang besar. Sebaliknya, Kabupaten Pamekasan dan Kabupaten Sumenep yang memiliki rata-rata pertumbuhan ekonomi lebih rendah (masing-masing 2,97% dan 4,67%) menunjukkan rata-rata rasio gini terendah (0,27), menandakan distribusi pendapatan yang lebih merata. Secara keseluruhan, grafik ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak serta-merta diikuti oleh distribusi pendapatan yang adil, sehingga

upaya peningkatan kualitas pertumbuhan perlu dibarengi dengan kebijakan pemerataan yang kuat.

Disamping karena pertumbuhan ekonomi, terdapat juga tingkat kemiskinan. Ketimpangan pendapatan dan kemiskinan adalah dua isu utama dalam pembangunan ekonomi yang saling berkaitan erat. Ketimpangan pendapatan mencerminkan distribusi pendapatan yang tidak merata di antara individu atau kelompok dalam suatu wilayah, sementara kemiskinan merujuk pada keadaan di mana individu tidak memiliki kemampuan untuk mencukupi kebutuhan dasar kehidupannya. Wilayah Germakertasusila Plus yang mencakup Gresik, Madura, Lamongan, Mojokerto, Surabaya, Jombang, Tuban, Bojonegoro dan Pasuruan serta Sidoarjo merupakan kawasan strategis dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat. Namun, kawasan ini juga menghadapi permasalahan sosial ekonomi, termasuk tingginya tingkat kemiskinan di beberapa daerah dan menghadapi tantangan besar dalam hal pemerataan kesejahteraan.

Tingkat kemiskinan yang tinggi di beberapa bagian wilayah Germakertasusila Plus menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih belum mampu memenuhi kebutuhan dasar, baik dari segi pangan, pendidikan, maupun kesehatan. Meskipun terdapat berbagai program pemerintah untuk menurunkan angka kemiskinan, hasilnya sering kali tidak merata. Ketimpangan akses terhadap pendidikan dan peluang kerja, misalnya, menjadi salah satu penghambat utama dalam menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera. Permasalahan pemerataan pendapatan sangat terkait dengan upaya pengentasan kemiskinan (Arsyad, 2017). Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis untuk mengurangi tingkat kemiskinan serta mengurangi kesenjangan pendapatan.



Gambar 1.3 Grafik Rata-rata Tingkat Kemiskinan dan Rasio Gini Wilayah Pengembangan (WP) Germakertasusila Plus Tahun 2011-2023

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah (2023)

Berdasarkan Gambar 1.3 terdapat beberapa kabupaten/kota di Germakertasusila Plus yang menunjukkan indikasi permasalahan serius baik dari sisi tingkat kemiskinan maupun ketimpangan pendapatan. Kabupaten Sampang menempati posisi paling kritis dengan rata-rata tingkat kemiskinan tertinggi sebesar 24,3% dan rata-rata Gini Ratio rendah (0,27), yang menunjukkan bahwa mayoritas penduduk hidup dalam kondisi miskin secara merata. Kondisi serupa juga terjadi di Kabupaten Pamekasan dan Bangkalan, yang masing-masing memiliki rata-rata tingkat kemiskinan tinggi (20,3% dan 21,6%) dengan rata-rata Gini Ratio rendah (0,28 dan 0,27), mencerminkan ketimpangan yang kecil namun dengan sebaran kemiskinan yang luas.

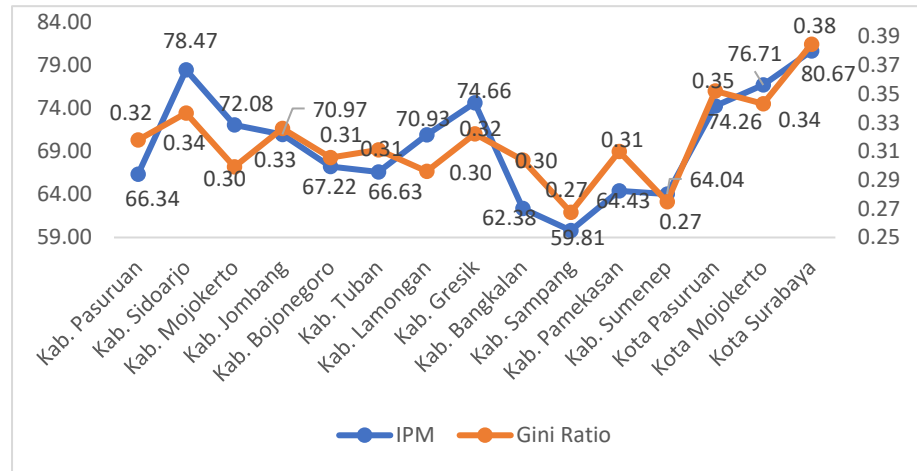
Kota Surabaya menghadapi tantangan berbeda, yaitu tingkat rata-rata kemiskinan rendah (5,42%) namun rata-rata Gini Ratio tertinggi (0,41), mengindikasikan ketimpangan yang tajam antara kelompok kaya dan miskin. Kota Mojokerto dan Kabupaten Sidoarjo juga mengalami fenomena serupa dengan rata-rata kemiskinan rendah namun rata-rata Gini Ratio relatif tinggi (0,34), menandakan bahwa kesejahteraan tidak terdistribusi secara merata.

Daerah-daerah tersebut menjadi perhatian utama karena meskipun konteks permasalahannya berbeda, baik tingginya angka kemiskinan maupun ketimpangan ekstrem dapat memicu ketidakstabilan sosial dan memerlukan intervensi kebijakan yang tepat sasaran.

Di sisi lain, kesejahteraan masyarakat yang mencakup akses terhadap kebutuhan dasar, tingkat pendidikan dan kualitas hidup memiliki hubungan erat dengan ketimpangan pendapatan. Secara tidak langsung, kesejahteraan masyarakat dipicu oleh kesenjangan pendapatan yang diakibatkan karena tingkat pendidikan sosial serta pertumbuhan ekonomi yang berbeda. Ketika tingkat kesejahteraan masyarakat rendah, khususnya di daerah pedesaan atau pinggiran, ketimpangan pendapatan semakin sulit diatasi karena masyarakat kurang memiliki kemampuan untuk berpartisipasi dalam pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, peningkatan kesejahteraan masyarakat seperti melalui pengembangan infrastruktur, program pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi, dapat mempersempit jurang ketimpangan dan menciptakan distribusi pendapatan yang lebih merata.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) digunakan sebagai indikator untuk mengukur kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. IPM terdiri dari tiga komponen utama yang saling terkait, yaitu standar hidup, tingkat kesehatan, dan tingkat pendidikan. Peningkatan IPM dapat mendorong produktivitas masyarakat yang lebih tinggi, yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan. Sebaliknya, IPM yang rendah akan mengakibatkan penurunan produktivitas dan berdampak negatif pada tingkat pendapatan. Karena itu, untuk meningkatkan IPM, pemerintah harus fokus pada ketiga komponen utama tersebut, serta faktor-

faktor pendukung lainnya seperti pembangunan infrastruktur, pembukaan kesempatan kerja, dan pertumbuhan ekonomi.

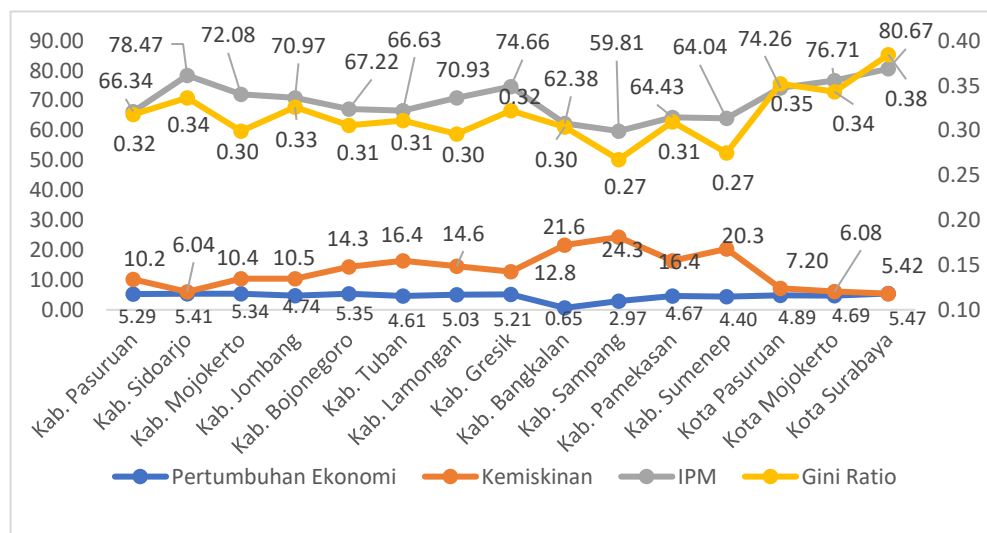


Gambar 1.4 Grafik Rata-rata Indeks Pembangunan Manusia dan Rasio Gini Wilayah Pengembangan (WP) Germakertasusila Plus Tahun 2011-2023

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah (2023)

Berdasarkan Gambar 1.4 menunjukkan hubungan antara rata-rata Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan rata-rata rasio Gini di berbagai kabupaten/kota di Germakertasusila Plus. Secara umum, daerah dengan rata-rata IPM tinggi cenderung memiliki rata-rata rasio Gini yang juga tinggi, mencerminkan bahwa pembangunan manusia yang maju belum tentu disertai dengan pemerataan pendapatan. Contohnya, Kota Surabaya memiliki rata-rata IPM tertinggi (80,67) dan rata-rata rasio Gini juga tertinggi (0,38), diikuti oleh Kota Mojokerto (rata-rata IPM 76,71; rata-rata rasio Gini 0,34) dan Kabupaten Sidoarjo (rata-rata IPM 78,47; rata-rata rasio Gini 0,34). Sebaliknya, Kabupaten Pamekasan dan Kabupaten Sampang memiliki rata-rata IPM terendah masing-masing 59,81 dan 62,38, serta rata-rata rasio Gini rendah yaitu 0,27 dan 0,30, mengindikasikan kondisi pembangunan manusia yang lemah namun distribusi pendapatan yang relatif merata, kemungkinan akibat rendahnya kesenjangan antar kelompok pendapatan di wilayah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi.

Pola ini memperkuat fakta bahwa kualitas pembangunan manusia tidak selalu sejalan dengan pemerataan ekonomi, dan bahwa daerah dengan urbanisasi dan pembangunan lebih tinggi cenderung menghadapi tantangan dalam mengatasi ketimpangan sosial. Grafik ini menekankan pentingnya kebijakan pembangunan yang tidak hanya fokus pada peningkatan IPM, tetapi juga memperhatikan aspek keadilan sosial melalui pengurangan ketimpangan distribusi pendapatan.



Gambar 1.5 Gabungan Rata-rata Variabel Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Kemiskinan, IPM, dan Rasio Gini di Wilayah Germakertasusila Plus Tahun 2011-2023

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah (2023)

Gambar 1.5 tersebut menyajikan data mengenai rata-rata pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan rasio Gini di beberapa kabupaten/kota di Germakertasusila Plus. Secara umum, grafik menunjukkan bahwa daerah dengan IPM yang tinggi seperti Kota Surabaya (80,67), Kota Mojokerto (76,71), dan Kota Pasuruan (74,26) cenderung memiliki tingkat kemiskinan yang lebih rendah dan rasio gini yang lebih tinggi, yang mengindikasikan ketimpangan distribusi pendapatan. Sebaliknya, daerah seperti Kabupaten Sampang dan Kabupaten Bangkalan memiliki IPM yang rendah

(59,81 dan 62,38) dengan tingkat kemiskinan yang tinggi (24,3 dan 21,6) dan rasio gini yang rendah.

Menurut Kuncoro (2013) kemiskinan terjadi karena sumber daya manusianya yang rendah dan, akses kegiatan perekonomian yang belum maksimal, dan belum meratanya pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Pertumbuhan ekonomi antar daerah relatif bervariasi namun berada pada kisaran sempit, tidak menunjukkan pola yang konsisten terhadap IPM atau kemiskinan. Misalnya, Kabupaten Sidoarjo memiliki pertumbuhan ekonomi tinggi (5,41) namun IPM-nya berada di bawah kota-kota besar. Secara keseluruhan, grafik ini menggambarkan bahwa pembangunan manusia dan kesejahteraan tidak selalu linier terhadap pertumbuhan ekonomi, serta bahwa ketimpangan pendapatan perlu diperhatikan dalam konteks pembangunan daerah.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat beberapa alasan yang melatarbelakangi penelitian ini. *Research gap* yang diidentifikasi adalah adanya kesenjangan yang timbul akibat pengaruh pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, dan indeks pembangunan manusia terhadap ketimpangan pendapatan di Wilayah Pengembangan (WP) Germakertasusila Plus. Kondisi pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, indeks pembangunan manusia, dan disparitas pendapatan masih menunjukkan fluktuasi dan belum mencapai kestabilan. Penulis bermaksud untuk mengkaji sejauh mana pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, dan indeks pembangunan manusia mempengaruhi ketimpangan pendapatan. Oleh karena itu, penelitian ini diberi judul: "Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Kemiskinan, dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Ketimpangan Pendapatan di Wilayah Germakertasusila Plus".

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan di wilayah Germakertasusila Plus?
2. Bagaimana pengaruh tingkat kemiskinan terhadap terhadap ketimpangan pendapatan di wilayah Germakertasusila Plus?
3. Bagaimana pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap ketimpangan pendapatan di wilayah Germakertasusila Plus?

1.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan di wilayah Germakertasusila Plus.
2. Untuk menganalisis pengaruh tingkat kemiskinan terhadap terhadap ketimpangan pendapatan di wilayah Germakertasusila Plus.
3. Untuk menganalisis pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap ketimpangan pendapatan di wilayah Germakertasusila Plus.

1.3 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Penulis, penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan memperdalam pemahaman penulis tentang teori-teori yang telah dipelajari selama perkuliahan, terutama yang berhubungan dengan ilmu ekonomi.
2. Bagi Universitas, hasil penelitian ini dapat menambah koleksi referensi yang ada di universitas dan bisa dimanfaatkan oleh pihak yang membutuhkan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran, khususnya di bidang ilmu ekonomi.

3. Bagi Pembaca, penelitian ini diharapkan dapat menyajikan informasi yang berguna bagi pembaca serta memberikan ide-ide baru bagi pihak yang menghadapi masalah serupa atau berniat melanjutkan penelitian di bidang yang sama.
4. Bagi Pemerintah, penelitian ini diharapkan menjadi masukan yang penting untuk pemerintah dalam lebih memperhatikan masalah ketimpangan pendapatan. Selain itu, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam merumuskan kebijakan yang relevan.